

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF) untuk periode 2017-2018, daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-52 dari 137 negara yang dievaluasi. Namun, pada tahun 2018, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia turun menjadi 71 dari 140 negara. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 141 negara. Tantangan lain dalam pendidikan infrastruktur di Indonesia juga tercermin pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9 terkait pendidikan, inovasi, dan infrastruktur. Pada tahun 2019, dari enam lembaga pendidikan terkait SDG 9, empat lembaga menunjukkan kemajuan, dan dua lembaga masih memerlukan perhatian khusus (Bappenas, 2020). Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia dan mencapai SDG 9, anggaran infrastruktur perlu dikelola dengan lebih baik. Indikator lain tingkat pendidikan infrastruktur di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI merupakan alat untuk mengukur tingkat pendidikan pada tingkat nasional, regional, dan regional / perkotaan di Indonesia. Elemen indikator pengukuran pembangunan infrastruktur terletak pada pilar pertama (pertumbuhan dan pembangunan ekonomi) (Harsono et al., 2024). Peringkat Pilar 1 memiliki dampak tertinggi terhadap indeks keseluruhan (sekitar 50%), diikuti oleh Pilar 2 dan 3 sebesar 25%. Gambar 1 menunjukkan bahwa dibandingkan kedua pilar, kolom 1 memiliki nilai terendah dan berada di

bawah rata-rata IPEI. Meskipun faktor penilaian infrastruktur ekonomi memiliki bobot yang tinggi, namun tetap tidak berkontribusi terhadap rata-rata skor IPEI (Gultom et al., 2023).

**Gambar 1.1 Daftar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9 oleh Bappenas 2023**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2016)	REALISASI PENCAPAIAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	Badan Pusat Statistik	Rp. Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
9.2.2	Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	persen	5,07	5,74	5,12	5,45	-	-
9.2.3	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan	Badan Pusat Statistik	%	12,83	15,83	16,38	17,05	17,03	17,71
Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar									
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil menengan terhadap total nilai tambah industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	-	-	43,36	41,69	41,68	41,68

Sumber : Jogja Dataku

SDGs adalah program global jangka panjang yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Sebagai bagian dari komunitas internasional, penting bagi kita untuk melihat negara lain dan PBB sebagai bagian dari "masyarakat negara." (BPS, 2014). Menurut Robert Jackson, memahami masyarakat negara tidak hanya bergantung pada model-model ilmu sosial, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang sejarah dan pengalaman praktisi masa lalu serta masa kini (Widianti, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami program global seperti SDGs dari sudut pandang historis sangat penting untuk mengetahui alasan kemunculannya. Pada tahun 2000, PBB meluncurkan program MDGs yang berlangsung hingga tahun 2015, dan sejak tahun 2016 hingga tahun 2030, PBB kembali meluncurkan inisiatif baru yang

dikenal sebagai SDGs. Indonesia, bersama 192 negara lainnya, telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai program pembangunan berkelanjutan, yang diresmikan melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017. Wakil Presiden Indonesia, H.M. Jusuf Kalla, dalam pembukaan Konferensi Tahunan SDGs di Jakarta, menyatakan bahwa program ini merupakan tanggung jawab global yang penting. Menurutnya, "Globalisasi telah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, dunia memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran, serta aspek-aspek positif lainnya bagi keluarga di seluruh dunia."

Pencapaian SDGs di suatu negara memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga sektor publik dan swasta (Natalia & Maulidya, 2023). PBB menyoroti pentingnya peran pemangku kepentingan melalui Major Groups and Other Stakeholders (MGoS), yang mencakup 9 sektor masyarakat, termasuk sektor bisnis dan industri, yang berkontribusi pada inisiatif pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyatakan bahwa sektor swasta adalah mitra penting untuk mencapai tujuan suatu pembangunan berkelanjutan. Namun, banyak pengusaha dan perusahaan di Indonesia belum menyadari peran mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk menangani hal ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 yang mengatur implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan dan memperjelas peran aktor dalam agenda global ini.

Pemerintah Indonesia membagi tim organisasi pelaksana SDGs menjadi 4 platform partisipasi yaitu Pemerintah dan Parlemen, Organisasi Masyarakat, Akademisi dan Pakar, serta Filantropi dan Pelaku Usaha. Keempat platform ini memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dan bekerja sama demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan SDG yang kesembilan adalah memajukan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mendorong industrialisasi dan memperkuat infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat, sejalan dengan kebijakan 2020-2024 (Alisjahbana, 2020, p.146). Pembangunan infrastruktur Indonesia juga didukung oleh desentralisasi fiskal melalui alokasi dana kompensasi. Dana tersebut terdiri dari Dana Bantuan Hibah (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Bebas Pajak, dan Dana Hibah Khusus (DAK). Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas DAU dan DBH diberikan kepada APBN untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dalam APBN 2017, pemerintah mengamanatkan minimal 25% DTU digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung dengan pelayanan publik dan percepatan pembangunan ekonomi (R. Alvaro, 2020). Penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi. Lebih dari 50% orang di dunia tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, perkembangan bidang transportasi massal dan energi terbarukan sama pentingnya dengan perkembangan bidang TI dan komunikasi (Anisa et al., 2024). Selain itu, kemajuan teknologi sangat penting untuk mencari solusi

jangka panjang untuk masalah ekonomi dan lingkungan, seperti meningkatkan efisiensi energi dan membangun lapangan kerja baru (Indrayani, 2020). Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, industri harus berkelanjutan dan berinvestasi dalam penelitian dan inovasi (A Al Aidhi, 2023).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Malaysia aktif menjadi tuan rumah kompetisi sains di negaranya, mengundang seluruh pelajar dan khususnya generasi muda di Asia untuk berkompetisi dalam penciptaan inovasi. Para peneliti mempekerjakan salah satu penyelenggara kompetisi sains berbasis Go-Green yang diluncurkan oleh I-FINOG dari Universiti Malaysia Pahang. Lebih lanjut, mengutip pernyataan resmi Dato' Kamal Zuhairi selaku Ketua I-FINOG, penting bagi Malaysia untuk mencapai tujuan SDGS dengan mengadakan kompetisi ilmiah menggunakan konsep inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa dari berbagai negara demi keberlanjutan infrastruktur lingkungan. Tujuan dari kegiatan kompetisi ilmiah tersebut adalah untuk mewakili negara sebagai sumber inovasi melalui penciptaan karya yang mendukung ramah lingkungan dan teknologi modern. Oleh karena itu, implementasi tersebut akan dilakukan dengan memberikan ruang kepada perwakilan negara lain untuk menyampaikan sesuatu sehingga dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menerapkan strategi Malaysia untuk mencapai SDGS Goal 9.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menetapkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 untuk industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi dan infrastruktur yang tangguh. Agenda 2030 dan Agenda Aksi

Addis Ababa menekankan betapa pentingnya pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agenda Tindakan Addis Ababa berkomitmen untuk menemukan tindakan dan mengatasi kesenjangan penting antara Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka bekerja sama dengan baik dan bahwa pelaksanaannya akan membantu orang lain.

Di antara bidang-bidang lintas sektoral, Agenda Aksi Addis Ababa berkonsentrasi pada mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan; menciptakan lapangan kerja yang penuh dan produktif; dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, penerapan pembangunan yang berkelanjutan sudah mulai berkembang dan digunakan sebagai acuan untuk pembangunan di segala bidang. Konsep ekonomi biru membantu pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sebagai contohnya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki banyak wilayah perairan laut dan perairan umum daratan.

Menurut data dari Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2011, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 3.544.743,9 km<sup>2</sup>, yang mencakup laut teritorial seluas 2.884.210,9 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.981.211 km<sup>2</sup>, serta wilayah laut 12 mil yang mencakup 279.322 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai mencapai 104.000 km (KKP, 2011). Angka-angka tersebut menggambarkan potensi besar perikanan laut Indonesia. Selain itu, untuk perikanan di perairan umum daratan, Indonesia memiliki potensi seluas

158.125 hektar. Bahkan untuk sektor kelautan dan perikanan menyumbang 6,48% PDB Nasional melebihi sektor pertanian yang hanya sebesar 3,42%.

Diplomasi menjadi hal prioritas pada aspek SDGs, karena dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, negara-negara dapat saling terhubung dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Berbagai cara digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Diplomasi dilaksanakan dalam setiap pertemuan khusus antar negara. Diplomasi merupakan upaya suatu negara dalam mengedepankan kepentingan nasionalnya di kancah internasional, yang juga bisa diartikan sebagai hubungan luar negeri antara suatu negara dengan negara lainnya (Tulus & Kartika, 2007).

Diplomasi melibatkan pembentukan hubungan antara negara-negara, baik secara multilateral (melibatkan banyak negara) maupun bilateral (melibatkan dua negara). Diplomasi bilateral mencakup hubungan politik, ekonomi, dan kebudayaan antara dua negara melalui perjanjian, pertukaran Duta Besar, serta kunjungan kenegaraan (Djelantik, 2008). Saat ini, diplomasi tidak hanya dilakukan secara tradisional namun juga melalui diplomasi publik. Diplomasi publik menggunakan pendekatan yang lebih lembut, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang suatu negara, merubah persepsi mereka, meningkatkan apresiasi terhadap negara tersebut, dan memperbaiki hubungan antar negara, contohnya melalui pendidikan atau budaya populer (Jayanti et al., 2019; Hennida, 2008).

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam pelaksanaan diplomasi publiknya. Banyaknya kompetisi ilmiah yang

diadakan merupakan alat yang digunakan sebagai alat diplomasi publik. Aspek pendidikan itu sebagai diplomasi publik Malaysia. Malaysia saat ini menjadi negara yang maju, baik dalam perekonomian, teknologi maupun pendidikannya. Menurut BBC Time yang terbit pada tahun 2016, Malaysia menempati urutan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di wilayah Asia Timur, pernyataan tersebut ditulis pada artikel berjudul 20 Best Education System in the World. Maka dari itu, terdapat badan milik pemerintah yang memiliki fokus membantu negara-negara bidang melalui bebrera sektor yang salah satunya adalah pendidikan.

I-FINOG Pahang, Malaysia merupakan lembaga kompetisi ilmiah milik Universitas Pahang Malaysia yang bernaung di bawah pemerintah. Kompetisi ini mengelola kegiatan edukatif dengan negara-negara luar termasuk Indonesia. I-FINOG juga berusaha mengembangkan kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan peraturan mengenai pendidikan di negara kerabatnya. Upaya ini dirasa mampu menopang negara lainnya dalam mendukung aspek pendidikan mereka secara internal.

Penelitian ini menggunakan lima tinjauan literatur sebelumnya (*state of the art*) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini. "*India's New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action*" adalah penelitian Ian Hall yang diterbitkan pada tahun 2012 di *Journal of Public Diplomacy* (Hall, 2012). Penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah India untuk memaksimalkan soft power melalui diplomasi publik baru. Untuk menjelaskan cara pemerintah India tradisional memanfaatkan *soft power*, Hall mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori diplomasi

publik. Dalam literatur berikut, dari sudut pandang negara Indonesia sendiri, kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat pedesaan, mengatasi kemiskinan di pedesaan, dan mempertimbangkan implementasi serta persepsinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah desa Walgajaya menerapkan program cabang yang diluncurkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi yaitu SDGs Desa. Aplikasi SDG desa bertujuan untuk mendata warga, perangkat desa (desa), dan perkumpulan masyarakat (RW). Oleh karena itu yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah upaya luar negeri untuk melaksanakan SDGS dikenal dengan mendukung pelaksanaan kompetisi ilmiah yang nantinya mungkin dilakukan oleh negara Indonesia. Kompetisi ilmiah berikutnya akan diadakan selama lima hari untuk melihat bagaimana karya yang dihasilkan dapat mendukung tujuan SDGS dan tujuan di masa depan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengarah pada latar belakang masalah yang terdapat di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti yakni:

Bagaimana Diplomasi Malaysia melalui International Festival On Green Technology (I-FINOG) dalam Mewujudkan SDGS Goals Ke-9?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini ialah:

Mengetahui diplomasi yang dilakukan Negara Malaysia melalui Kompetisi Ilmiah I-FINOG dalam Mewujudkan Lingkungan *Go-Green* pada SDGS Goals ke-9.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Aspek Akademik

Berkontribusi kepada ilmu sosial melalui ilmu yang telah dipelajari, terutama dalam bidang lingkungan infrastruktur negara.

##### 2. Aspek Praktis

- a. Sebagai indikator kajian bagi Pemerintah Indonesia terkait lingkungan yang ramah melalui pembentukan inovasi yang mewujudkan SDGS.
- b. Penelitian ini diharapkan sanggup menjadi edukasi untuk mengetahui upaya mewujudkan SDGS melalui diplomasi Malaysia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini terdiri atas empat bab yang membahas mengenai:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang latar belakang Malaysia untuk mewujudkan SDGS melalui dukungan penyelenggaraan sebuah kompetisi ilmiah.

##### **BAB II           KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan

tentang teori diplomasi publik dengan konsep SDGS dan Kompetisi Ilmiah.

**BAB III          DIPLOMASI          MALAYSIA          MELALUI  
INTERNATIONAL          FESTIVAL          ON          GREEN  
TECHNOLOGY (I-FINOG) DALAM MEWUJUDKAN  
SDGS GOALS KE-9**

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai salah satu bentuk upaya yang dilakukan Malaysia melalui penyelenggaraan I-FINOG dalam mengetahui proses kegiatan berlangsung hingga menghasilkan karya sebagai implementasi SDGS.

**BAB IV          RENCANA PENUTUP**

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi.